

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perguruan Tinggi merupakan salah satu tempat untuk mengembangkan ilmu dan sebagai tumpuan dalam mendorong kemajuan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi melalui ilmu yang sudah didapat. Saat ini dunia pendidikan sudah semakin berkembang, maka persaingan untuk menjadi lembaga pendidikan yang unggulpun semakin ketat. Bagus tidaknya sebuah Perguruan Tinggi bukan hanya dinilai dari segi kuantitas saja, tetapi dilihat juga dari segi kualitas kinerja yang dihasilkan. Hal tersebut memaksa Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta bersaing secara ketat untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada dan memanfaatkan peluang-peluang dengan kekuatan yang dimiliki.

Dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 terdapat tiga indikator utama dalam penilaian kinerja Perguruan Tinggi, yaitu kualitas lulusan yang diukur dengan mendapat pekerjaan yang layak dan Mahasiswa mendapat pengalaman di luar Universitas; kualitas dosen dan pengajar yang diukur dengan dosen berkegiatan di luar kampus, praktisi mengajar di dalam kampus dan hasil kerja dosen yang digunakan masyarakat serta dapat rekognisi Internasional; kualitas kurikulum yang memiliki sub indikator antara lain program studi bekerjasama dengan mitra kelas dunia, kelas yang kolaboratif dan partisipatif serta adanya program studi berstandar nasional. Kinerja yang berkualitas dapat dilihat dari bagaimana Perguruan Tinggi mencapai suatu target tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya atau dapat dinyatakan selesai berdasarkan suatu batasan waktu tertentu. Pengelolaan keuangan pada Perguruan Tinggi merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam melakukan penilaian terhadap kinerja Perguruan Tinggi untuk menerapkan kepemimpinan yang baik dan benar.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang dimaksud kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Jadi, Keluaran (*output*) merupakan hasil yang ingin dicapai dari suatu kegiatan yang dilaksanakan berupa barang atau jasa dalam mencapai suatu sasaran dan tujuan tertentu. Dengan demikian, kinerja keuangan adalah suatu ukuran dari pengelolaan keuangan organisasi dikaitkan dengan pusat pertanggung jawaban.

Menurut Anju Agustin Damanik (2019) kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu organisasi telah melaksanakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Seperti dengan membuat suatu laporan keuangan yang telah memenuhi standar dan ketentuan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) atau General Accepted Accounting Principle (GAAP) dan lainnya. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjelaskan bahwa menteri dan pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran/barang mempunyai tugas dalam menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian dan lembaga yang dipimpinnya. Proses penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia, baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta harus mengikuti tata aturan yang berlaku, termasuk dalam pengelolaan keuangannya. Proses penerimaan dan alokasi pendanaan perguruan tinggi diharapkan dapat dilakukan dengan baik sehingga mampu menghasilkan kinerja keuangan perguruan tinggi yang sehat. Untuk mencapai kinerja keuangan yang diharapkan, lembaga pemerintah perlu memperkuat sistem pengendalian internalnya agar dapat meningkatkan kinerja instansinya.

Menurut Renancy Sinaga G.B. (2021) pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber asset suatu instansi. Sistem pengendalian internal sangat berperan penting dalam menciptakan efisiensi dan produktivitas operasional, utamanya dalam mencapai tujuan institusi dan keberhasilan reformasi sektor publik (PP No.4 tahun 2022). Pengendalian internal akan meningkatkan kemampuan untuk mengidentifikasi capaian yang

dihasilkan serta keberhasilan kinerja dan kemampuan ini dapat mengarah pada peningkatan akuntabilitas instansi pemerintah. Jika dalam suatu organisasi pengendalian internnya lemah, maka akan menyebabkan kinerja yang tidak maksimal, sehingga berdampak pada output yang dihasilkan dalam pelaksanaan manajemen berbasis kinerja.

Menurut Putra (2021) pengendalian internal yang buruk akan mengakibatkan peluang terjadinya *fraud* yang bisa berakibat kerugian instansi baik dalam sisi finansial maupun non finansial. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan sistem pengendalian internal untuk mencegah terjadinya *fraud* yang dapat mengakibatkan kerugian pada Perguruan Tinggi. Sistem pengendalian internal tersebut digunakan untuk menghindari manipulasi oleh berbagai pihak, karena manipulasi hanya dapat terjadi apabila tidak adanya pengawasan intern yang baik akibat kurangnya dilakukan evaluasi terkait pelaksanaan pengendalian internal. Oleh sebab itu, perlu dilakukan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan penerapan sistem pengendalian internal pada kinerja keuangannya, guna menjaga ketelitian dan keandalan catatan bagian administrasi.

Rujukan sistem pengendalian intern yang banyak digunakan di seluruh dunia adalah *Committee of Sponsoring Organizations (COSO)*, yaitu suatu organisasi swasta di Amerika yang mensponsori praktik sistem pengendalian intern. Konsep sistem pengendalian intern menurut COSO kemudian diadopsi untuk sektor publik (instansi pemerintah) di Indonesia melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP diartikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Proses ini dilakukan melalui 5 unsur pengendalian yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. Melalui SPIP, diharapkan pencapaian tujuan organisasi sektor publik menjadi lebih mudah. Unsur Sistem Pengendalian Intern dalam Peraturan Pemerintah ini

mengacu pada unsur Sistem Pengendalian Intern yang telah dipraktikkan di lingkungan pemerintahan di berbagai negara, yaitu sebagai berikut:

- a) Lingkungan pengendalian
Pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat.
- b) Penilaian risiko
Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam.
- c) Kegiatan pengendalian
Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan Instansi Pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi.
- d) Informasi dan komunikasi
Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan Instansi Pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan Instansi Pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya.
- e) Pemantauan
Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan revidu lainnya dapat segera ditindaklanjuti.

Sebuah Perguruan Tinggi harus benar-benar memperhatikan dipatuhinya sistem pengendalian internal untuk menghindari tingkat kecurangan. Apalagi sekarang tingkat kecurangan di Indonesia tiap tahunnya selalu meningkat. Dilansir dari nasional.okezone.com bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat telah menerima 2.173 laporan dari masyarakat berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi selama semester I pada tahun 2022. Angka tersebut

mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan jumlah laporan pada periode yang sama pada tahun 2021 yaitu sebanyak 2.045 laporan.

Fenomena yang terjadi pada Perguruan Tinggi di Indonesia dewasa ini adalah kasus korupsi yang dilakukan oleh Rektor Universitas Negeri Lampung (UNILA) sebesar Rp 5 miliar terkait kasus suap penerimaan mahasiswa/i seleksi jalur mandiri. Hal tersebut terjadi karena adanya kerja sama antara rektor, wakil rektor I bidang akademik, ketua senat dan pihak swasta sehingga pihak Satuan Pengawas Internal (SPI) tidak akurat dalam mengungkap penyelewengan (www.bbc.com). Penyelewengan ini juga terjadi karena Sistem Pengendalian Internal pada Universitas Negeri Lampung (UNILA) masih kurang efektif dan efisien yang disebabkan oleh kurang dilakukannya evaluasi terhadap pelaksanaan penerapan sistem pengendalian internal sehingga jadi peluang untuk melakukan *fraud* oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Beberapa kajian dan penelitian mengenai evaluasi penerapan pelaksanaan sistem pengendalian internal pada kinerja organisasi di Perguruan Tinggi telah banyak dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Faiz Zamzami dan Ihda Arifin Faiz (2015) dengan judul penelitian *Evaluasi Implementasi Sistem Pengendalian Internal: Studi Kasus pada Sebuah Perguruan Tinggi Negeri* menemukan hasil bahwa penerapan sistem pengendalian internal PTN X telah dijalankan dengan baik dan sesuai dengan SPIP. Namun demikian, perlu pembenahan dalam aspek layanan pengadaan barang dan jasa, dokumentasi penilaian resiko dan pengembangan aplikasi. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gabriela, Sifrid & Christian (2022) dengan judul *penelitian Pengaruh Pengendalian Internal dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Manajerial Pada Kampus IPDN Sulawesi Utara* dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal dan komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap manajerial pada Kampus IPDN Sulawesi Utara. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Choirul Hana (2021) dengan judul penelitian *Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Kas Melalui Virtual Account Pada Universitas Kahuripan Kediri* dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern dalam hal penerimaan kas akan tercipta apabila

virtual account diterapkan di seluruh komponen pembayaran, hal ini belum tercipta di Universitas Kahuripan Kediri sehingga penyelewengan terhadap penerimaan kas masih sangat mungkin dilakukan. Berdasarkan temuan-temuan dalam evaluasi penerapan sistem pengendalian internal pada Perguruan Tinggi masih banyak ditemukan kekurangan dan kelemahan. Hal tersebut disebabkan karena masih lemahnya pelaksanaan terhadap pengendalian internal sehingga masih banyak ditemukan temuan-temuan kesalahan yang bisa dijadikan peluang bagi oknum tidak bertanggungjawab untuk melakukan *fraud*. Pengendalian internal ini sangat berperan penting dalam jalannya sebuah Perguruan Tinggi untuk mencapai tujuan tertentu, Peran penting pengendalian internal terhadap jalannya Perguruan Tinggi menjadikan penelitian mengenai evaluasi penerapan sistem pengendalian internal pada kinerja keuangan di Perguruan Tinggi masih relevan untuk dilakukan.

Pengendalian internal yang baik tidak mudah diterapkan, masih banyak celah-celah kosong yang bisa dijadikan peluang yang dapat menyebabkan menurunnya kinerja keuangan Perguruan Tinggi. Contoh saja di Satuan Kerja (SATKER) yang terletak di Bengkalis yaitu Politeknik Negeri Bengkalis. Politeknik Negeri Bengkalis merupakan satu-satunya Perguruan Tinggi Negeri Vokasi di Riau yang bernaung dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Politeknik Negeri Bengkalis adalah lembaga Pendidikan vokasional yang dalam penyelenggaraan pendidikan menitik beratkan pada pencapaian kompetensi sesuai kebutuhan dunia industri. Politeknik Negeri Bengkalis berfokus pada pengembangan Pendidikan Vokasi di Bengkalis, menetapkan pengembangan kualitas pendidikan dan pembelajaran untuk mendukung kebutuhan industri di Riau. Hal ini menjamin setiap mahasiswa mendapatkan pengalaman langsung dari industri dan tempat kerja lainnya melalui studi eksekursi dan menawarkan teknologi dan fasilitas yang lengkap sesuai dengan bidang yang mereka pilih sehingga *link and match* kebutuhan dunia pendidikan dan dunia kerja atau mitra usaha yang ada dapat terpenuhi. Untuk memenuhi tujuan tersebut Politeknik Negeri Bengkalis perlu untuk memperkuat dan memperketat pelaksanaan sistem pengendalian internal pada kinerja keuangannya,

yaitu dengan melakukan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan penerapan sistem pengendalian internalnya

Melihat fenomena-fenomena diatas serta masih terdapatnya kelemahan dalam pelaksanaan pengendalian internal, maka peneliti tertarik untuk mengangkat hal tersebut dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pada Kinerja Keuangan Di Politeknik Negeri Bengkalis”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan lingkungan pengendalian pada kinerja keuangan yang diterapkan di Politeknik Negeri Bengkalis?
2. Bagaimanakah pelaksanaan penilaian risiko pada kinerja keuangan yang diterapkan di Politeknik Negeri Bengkalis?
3. Bagaimanakah pelaksanaan kegiatan pengendalian pada kinerja keuangan yang diterapkan di Politeknik Negeri Bengkalis?
4. Bagaimanakah pelaksanaan informasi dan komunikasi pada kinerja keuangan yang diterapkan di Politeknik Negeri Bengkalis?
5. Bagaimanakah pelaksanaan pemantauan terhadap kinerja keuangan yang diterapkan di Politeknik Negeri Bengkalis?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis serta mengevaluasi bagaimana pelaksanaan sistem pengendalian internal pada kinerja keuangan yang diterapkan di Politeknik Negeri Bengkalis. Penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui beberapa hal sebagai berikut:

1. Untuk mengevaluasi pelaksanaan lingkungan pengendalian pada kinerja keuangan yang diterapkan di Politeknik Negeri Bengkalis.
2. Untuk mengevaluasi pelaksanaan penilaian risiko pada kinerja keuangan yang diterapkan di Politeknik Negeri Bengkalis.

3. Untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengendalian pada kinerja keuangan yang diterapkan di Politeknik Negeri Bengkalis.
4. Untuk mengevaluasi pelaksanaan informasi dan komunikasi pada kinerja keuangan yang diterapkan di Politeknik Negeri Bengkalis.
5. Untuk mengevaluasi pelaksanaan pemantauan terhadap pengendalian internal pada kinerja keuangan yang diterapkan di Politeknik Negeri Bengkalis.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak berikut ini:

1. Bagi peneliti
Untuk menambah wawasan mengenai evaluasi penerapan sistem pengendalian internal pada kinerja keuangan yang telah diterapkan di Politeknik Negeri Bengkalis apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bagi peneliti selanjutnya
Diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan dan menjadi referensi dalam pengembangan penelitian selanjutnya terkait evaluasi penerapan sistem pengendalian internal pada kinerja keuangan di Politeknik Negeri Bengkalis.
3. Bagi Pengguna
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran dalam tanggung jawab dan tentang pentingnya evaluasi penerapan sistem pengendalian internal pada kinerja keuangan kepada pihak-pihak khususnya kepada pegawai Politeknik Negeri Bengkalis bagian keuangan untuk mewujudkan laporan keuangan yang handal dan akurat.
4. Bagi Politeknik Negeri Bengkalis
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang bermanfaat sebagai masukan dan pertimbangan bagi Politeknik Negeri Bengkalis untuk mengetahui arti pentingnya evaluasi terhadap pelaksanaan sistem

pengendalian intern pada kinerja keuangan di Politeknik Negeri Bengkalis. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber referensi studi khususnya bagi mahasiswa Proram Studi D-IV Akuntansi Keuangan Publik maupun mahasiswa yang lainnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari penelitian ini untuk menjelaskan secara ringkas rencana isi dari bagian per bagian pada laporan skripsi yang disusun sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tinjauan pustaka dan penjelasan landasan teori pendukung yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan digunakan sebagai acuan pembanding untuk membahas masalah, meliputi sistem pengendalian internal, komponen-komponen, fungsi-fungsi dan dokumen-dokumen yang terkait dengan sistem pengendalian internal penerimaan kas.

BAB 3 : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri dari lokasi, waktu dan jadwal penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik pengolahan data yang akan dipakai dalam penelitian ini.

BAB 4 : DESKRIPSI HASIL PENELITIAN DAN ANALISA

Bab ini menjelaskan deskripsi data yang diperoleh dari wawancara dan analisis data dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB 5 : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian dari penelitian yang telah dilakukan yang menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN